



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 152                      TAHUN : 1991    SERI : D NO. 151

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN" GUBERNLTR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 186 TAHUN 1991

TENTANG

RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil gu-na yang semaksimal mungkin dalam pelaksana-an pemerintahan dan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No-mor 6 Tahun 1988 maka perlu diadakan RAKQR-DA Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

b. bahwa untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kerja bagi semua instansi terkait di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka hasil rumusan RAKORDA tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 13 Seri D Nomor 13) ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1985 Nomor 59 Tahun 1985 tentang Rapat Staff dan Koordinasi;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Nopember 1990 Nomor 265/PER/ DIPDA/1990 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Perubahan I).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

#### Pasal 1

Menetapkan hasil rumusan RAKORDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

#### Pasal 2

Keputusan ini merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 13 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Dinas/Instansi Tingka: I Bali di Denpasar.
4. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Semua Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Semua Lembaga/Instansi Non Pemerintah di Denpasar.
7. Semua Kepala Instansi/Lembaga di Propinsi Daerah Tingkat I BALI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Ball  
Nomor ; 152 Tanggal : 29 April 1991  
Seri : D Nomor : 151.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA**

NIP. 010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TANGGAL 13 APRIL 1991 NOMOR 186 TAHUN  
1991 TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
1990/1991

Hasil Rumusan Kelompok I "PEMANTAPAN PELAKSANAAN VISIT  
INDONESIA YEAR 1991".

I. KONDISI SEKARANG:

1. Pariwisata merupakan sub sektor pembangunan yang dominan untuk Daerah Bali karena diandalkan untuk dapat memperbesar divisa, memperluas lapangan berusaha dan lapangan kerja mendorong laju pembangunan Daerah serta untuk membina persatuan nasional dan persahabatan antarbangsa.
2. Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya, memiliki nilai budaya tinggi serta keramah-tamahan penduduknya menjadi harapan pemerintah untuk dikembangkan dampak positifnya dan dihindarkan dampak negatifnya akibat perkembangan pariwisata tersebut.
3. Pariwisata memiliki keterkaitan industrial yang berdaya-ganda kuat dan luas jangkauannya, pembangunan pariwisata mempunyai sifat ketergantungan (Interdependensi) dan keterkaitan (Interelasi) yang kuat dengan hampir semua sector pembangunan. Produk pariwisata yang bermutu dan berdaya saing akan dapat diciptakan bilamana terjadi pertumbuhan yang baik di sektor pembangunan lainnya. Sebaliknya pembangunan pariwisata akan mendorong perkembangan di sektor pembangunan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka inilah pariwisata berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Untuk ini sangat diperlukan dilaksanakannya koordinasi yang sebaik-baiknya di antara semua komponen pariwisata baik pemerintah unsur industri maupun masyarakat seluruhnya.
4. Kondisi yang ada saat ini walaupun telah baik, masih dirasakan adanya kendala, "hambatan serta kekurangannya yang perlu

terus kita bina dan tingkatkan

#### H. PERMASALAHAN :

Untuk menjamin perkembangan pariwisata diperlukan citra produk yang baik yang dapat disingkat menjadi SAPTA PESONA yang merupakan inti daripada Sadar Wisata. Dalam rangka mewujudkan SAPTA PESONA itu diperlukan peran serta semua pihak, terutama komponen usaha pariwisata dan masyarakat. Di dalam kenyataannya masih terdapat kendala-kendala yang memerlukan penanganan secara terpadu yakni antara lain sebagai berikut:

##### 1. Masalah Keamanan :

- a. Masih dirasakan lemahnya koordinasi aparat keamanan dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah,
- b. Masih adanya gangguan kriminalitas antara lain pencopetan, pencurian dan kejahatan lainnya,
- c. Masih terjadi kasus-kasus "over stay" Wisma.

##### 2. Masalah Ketertiban :

Masih terdapat adanya gangguan ketertiban antara lain :

- a. Gelandangan/pengemis.
- b. Kaki lima yang tidak teratur.
- c. Bangunan liar.
- d. Lalu lintas sembrawat meliputi angkutan wisata, angkutan kota, rambu jalan (secara khusus juga pemasangan penunjuk arah), taxi, perparkiran dan halte.
- e. Pedagang acung.
- f. Ketertiban berbusana di kalangan wisatawan dan penduduk.
- g. Penanganan WTS.

##### 3. Masalah Kebersihan :

- a. Gangguan sampah misalnya masalah TPA, Depot Transito, Kontainer, waktu pembuangan/pengambilan.
- b. Pembuangan limbah yang sembarangan.
- c. Masalah bangkai anjing.
- d. Polusi udara (bau busuk pada jalan-jalan protokol) dan rawan penyakit.
- e. Telajakan yang kurang terurus.
- f. Kurangnya fasilitas sanitasi dan pemeliharannya

##### 4. Kesejukan:

- a. Kurangnya penghijauan pada obyek wisata dan jalur wisata.

- b. Pemangkasan dan pemotongan/penebangan tanaman-tanaman penghijauan secara liar dan tidak bertanggung jawab.
5. Keindahan :
- a. Kurangnya pertamanan di tempat-tempat umum.
  - b. Kurangnya penataan telajakan.
  - c. Lemahnya penghayatan arsitektur Bali dalam pembangunan.
  - d. Pemasangan papan reklame sembarangan.
  - e. Jemuran pakaian-pakaian kumuh.
6. Raman Tamah :
- Keramahtamahan dalam menunjang kepariwisataan masih terasa belum memadai, terutama di kalangan guide, sopir, pedagang dan petugas-petugas lainnya.
7. Kenangan :
- a. Masalah mutu dan pelayanan sehingga memberikan kesan yang kurang baik.
  - b. Apresiasi komponen pariwisata terhadap pertunjukan kesenian tradisional masih rendah, di lain pihak masih ada pertunjukan kesenian yang kurang memperhatikan mutunya.
  - c. Belum semua hotel menyediakan ruang pameran barang industri kecil.
  - d. Masih kurang informasi yang berwujud peta brosur leaflet dan lain-lainnya.

#### USUL/SARAN.

1. Keamanan:
- a. Koordinasi aparat keamanan perlu lebih dimantapkan di semua tingkat.
  - b. Deteksi dini perlu ditingkatkan untuk cegah dini.
  - c. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan pembinaan KANTIBMAS.
  - d. Untuk menanggulangi "over stay" perlu ada informasi yang cepat dari aparat keamanan dan aparat kepariwisataan.
2. Ketertiban :
- a. Perlu ditingkatkan pembinaan dan penanganan terpadu instansi terkait mengatasi masalah Gepeng.

- b. Mengadakan pembinaan terhadap pedagang acung agar tidak mengganggu, di samping menyediakan fasilitas tempat berjualan.
- c. Perlu tindakan tegas penertiban terhadap bangunan liar sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Perlu dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arah yang jelas, penertiban parkir, pengadaan halte, penertiban angkutan kota dan angkutan wisata.
- e. Perlu makin diarahkan wisatawan berpakaian sopan dan demikian juga petugas komponen pariwisata.
- f. Perlu diambil langkah untuk meniadakan kegiatan WTS

3. Kebersihan.

- a. Perlu diaktifkan kembali SATGAS di bidang kebersihan.
- b. Sarana dan prasarana seperti container, angkutan sampah dan mekanisme angkutan sampah dan TPA, transport depot perlu lebih ditertibkan dan ditingkatkan.
- c. Koordinasi aparat di bidang kebersihan perlu ditingkatkan.
- d. Untuk mengatasi rawan kesehatan dilakukan pengawasan pemeriksaan rutin sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kesejukan :

- a. Perlu dikembangkan dan ditingkatkan penghijauan di jalur dan obyek-obyek wisata.
- b. Perlu dicegah pemotongan/pemangkasan dan penebangan pohon secara liar dan ditingkatkan koordinasi dengan Kepala Wilayah di semua tingkat.

5. Keindahan :

- a. Taman umum perlu diperbanyak dan tempat-tempat strategis.
- b. Telajakan agar ditata dan diperindah.
- c. Peningkatan penghayatan terhadap arsitektur tradisional Bali.
- d. Penertiban terhadap reklarne-reklame liar.
- e. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

6. Ramah Tamah :

Kornponen, aparat kepariwisataan dan aparat-aparat lain perlu meningkatkan keramahtamahannya.

7. Kenangan :

- a. Peningkatan mutu barang-barang souvenir.
- b. Peningkatan Apresiasi komponen pariwisata terhadap kesenian Bali.
- c. Semua pementasan seni yang bersifat komersil harus memiliki PRAMANA PATRAM BUDAYA.
- d. Bagi hotel yang belum menyediakan ruang pameran industri kecil agar segera menyediakannya.
- e. Memperbanyak bahan-bahan informasi dan promosi dalam wujud brosur, leaflet dan lain-lain.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**EPA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13 APRIL 1991 NOMOR 186 TAHUN 1991 TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991.**

**Hasil Rumusan Kelompok II "PELAKSANAAN PENITIKBERATAN OTONOMI DI DAERAH TINGKAT IF.**

**I. KONDISI SEKARANG :**

1. Pertumbuhan Otonomi Daerah sudah semakin meningkat.
2. Kesadaran Aparat di Daerah Tingkat I dan Aparat di Daerah Tingkat II untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sudah semakin disadari pentingnya.
3. Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat II sudah mulai diperhatikan dasar hukumnya.
4. Pembinaan personil dan penataan lembaga-lembaga Pemerintahan di Daerah Tingkat II sudah semakin diperhatikan.
5. Pertumbuhan kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II sudah semakin meningkat setiap tahunnya dengan adanya bantuan dari Tingkat I.

**II. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN :**

1. Beberapa Peraturan Pemerintah yang memuat tentang Penyerahan Urusan baik kepada Daerah Tingkat I maupun kepada Daerah Tingkat II masih perlu diadakan peninjauan kembali sesuai dengan pertumbuhan situasi dewasa ini.

2. Masih ada beberapa Instansi di tingkat atasan yang belum mentuntaskan penyerahan sebagian urusannya kepada Daerah sehingga perkembangan kewenangan pangkal Daerah belum dapat dijalankan sepenuhnya antara lain :
  - a. Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Industri Kecil.
  - b. Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Bimbingan dan Perbaikan Sosial.
  - c. Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Perumahan.
  - d. Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Perusahaan dan Proyek-proyek Negara
3. Masih kurangnya personalia baik kualitas maupun kuantitas Daerah Tingkat II sehingga masih ada jabatan-jabatan struktural yang belum bisa diisi.
4. Undang-undang Keuangan yang ada sekarang belum mendukung ke arah terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II.
5. Masih perlu diadakan pengkajian secara mendalam tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Tingkat II sehingga tidak terjadi adanya penumpukan fungsi pada satu unit dan kekurangan fungsi pada unit yang lainnya.
6. Belum perkembangannya kualitas dan kuantitas aparat di Daerah Tingkat II untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari urusan yang sudah diserahkan oleh Daerah Tingkat I menjadi Otonomi Daerahnya.
7. Kemampuan Aparatur di Daerah untuk menguasai Peraturan-peraturan di bidang otonomi daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dapat mengetahui secara pasti mana yang menjadi kewenangan daerahnya.
8. Type-type Kecamatan dan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang sudah perlu ditinjau kembali sehingga mampu mengantisipasi perkembangan Otonomi Daerah.

#### USUL/SARAN:

- A. Perlu diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah yang baru segera dapat diterbitkan.
- B.
  1. Beberapa Peraturan pemerintah yang berkaitan tentang Penyerahan Urusan perlu ditinjau kembali oleh Pemerintah Pusat.
  2. Perlu segera dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Peraturan Pemerintah tentang titik berat otonomi dan syarat tolok ukur tentang kriteria bahwa suatu Daerah mampu melaksanakan urusan.

- c. Penambahan personil Daerah Tingkat II serta Kecamatan baik kualitatif dan kuantitatif perlu mendapat perhatian Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Pusat.
- d. Penataan kembali terhadap lembaga-lembaga unit kerja di Daerah Tingkat II perlu dilaksanakan sehingga tidak terjadinya penumpukan kerja dalam satu unit dan kekurangan kerja pada unit yang lain.
- e. Type-type Kecamatan dan Struktur Organisasi Kecamatan perlu diusulkan ke Pusat untuk disempurnakan kembali.
- f. Pembinaan kepada aparat-aparat di Daerah untuk benar-benar menguasai otonomi daerahnya perlu terus dilaksanakan (penataan dan pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah bagi Instansi dan Lembaga Daerah Tingkat I dan Tingkat II),
- g. Setiap Penyerahan Sebagian Urusan hams diikuti dengan personil, sarana/prasarana serta dana.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

NIP. 130222536

LAMPERAN HI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERBAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 13 APRIL 1991 NOMOR  
186 TAHUN 1991 TENTANG RUMUSAN HASIL  
RAPAT KOORDINASI DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991.

Hasil Rumusan Kelompok III "PENYEDERHANAAN  
TATALAKSANA PELAYANAN UMUM"

I. KONDISI SEKARANG:

Pelayanan Aparatur kepada umum/masyarakat baik dalam bidang yang menyangkut tata cara, pelayanan perijinan dan sebagainya masih dirasakan belum memadai (waktu/kecepatan/kepastian/kemudahan, biaya, keterpaduan) sehingga masih dipandang perlu disederhanakan/disempurnakan.

II PERMASALAHAN:

Masih beraneka ragamnya antara lain :

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur di berbagai Daerah Tingkat II, termasuk unit kerja yang menanganinya.

2. Batas waktu penyelesaian penanganan permohonan dipandang masih cukup lama,
3. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai perlengkapan permohonan masih cukup beraneka ragam.
4. Belum adanya suatu ketentuan Tatalaksana Pelayanan Umum yang efektif dan efisien.

### III. KESIMPULAN/SARAN:

1. Dipandang perlu mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk secara umum mengadakan peninjauan/penyempurnaan dalam rangka pelayanan umum yang berdasarkan cepat, mudah, sederhana dan murah,
2. Perlu dikaji keberadaan, pembentukan dan efektivitas tim-tim disesuaikan dengan maksud kita untuk menciptakan penyederhanaan kelancaran, kemudahan pelayanan umum.
3. Untuk RAKORDA kali ini khusus mengenai hotel Melati, rumah makan, ijin Pertambangan Daerah Galian Golongan C, Angkutan Wisata sepanjang yang menjadi kewenangan PEMDA Tingkat I perlu dilakukan peninjauan dan peningkatan tatalaksana serta tata kerja dalam perijinannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

TTD

**IDA BAGUS OKA.**  
NIP. 130222536

